

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Perkembangan ilmu dan teknologi yang berkembang pada saat ini sungguh sangat cepat dalam berbagai aspek kehidupan dan terjadi secara menyeluruh di seluruh penjuru dunia. Hal tersebut didorong oleh arus globalisasi yang mengakibatkan perkembangan ilmu dan teknologi semakin hari semakin pesat. Secara tidak langsung hal, ini juga menuntut manusia untuk terus bergerak melakukan perubahan-perubahan. Agar manusia dapat merasakan manfaat adanya globalisasi yang telah masuk di Indonesia, maka manusia perlu memiliki kemampuan dan kompetensi yang cukup serta sesuai dengan kebutuhannya. Bila hal tersebut tidak disiapkan dengan baik, maka bukan tidak mungkin bila nantinya kita akan terjajah oleh bangsa lain karena ketidakmampuan kita menghadapi era globalisasi sekarang ini. Kemampuan dan kompetensi yang dimiliki manusia tersebut hanya bisa diperoleh dengan pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun nonformal.

Pendidikan merupakan reorganisasi dan rekonstruksi yang konstan dari pengalaman. Pada setiap saat ada tujuan, perbuatan pendidikan selalu ditujukan untuk mencapai tujuan. Setiap fase perkembangan kehidupan, masa kanak-kanak, masa pemuda, dan dewasa, semuanya merupakan fase pendidikan, semua yang dipelajari pada fase-fase tersebut mempunyai arti sebagai pengalaman. Pendidikan itu tidak berakhir, kecuali kalau seseorang sudah mati.<sup>1</sup>

John Dewey mengaskan bahwa pendidikan itu tidak mempunyai tujuan, hanya orang tua, guru, dan masyarakat yang mempunyai tujuan. Dia dengan tegas menyatakan “*And it is well to remind our selves that education as such has no aims. Only persons, parents, and teacher etc, not an abstract idea like education*”.<sup>2</sup> Konsep pendidikan Dewey yang berlandaskan pada filsafat pragmatisme, menilai

---

<sup>1</sup> Ruma Mubarak, ‘Pendidikan Humanis John Dewey Dalam Perspektif Pendidikan Islam’, *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2.1 (2015), 1–21 <<https://doi.org/10.18860/jpai.v2i1.3760>>.

<sup>2</sup> Mubarak.

suatu pengetahuan dalam masyarakat. Yang diajarkan adalah pengetahuan yang segera dapat dipakai dalam penghidupan masyarakat sehari-hari. Kilpatrick yang dipengaruhi oleh pemikiran Dewey merancang metode pendidikannya yang disebutnya dengan metode proyek. Artinya, anak didik diberi kebebasan untuk menentukan sendiri jenis pekerjaan yang sesuai dengan minatnya, sehingga nanti bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>3</sup>

Tujuan pendidikan pragmatisme adalah menyiapkan peserta didik menghadapi masa depannya, sehingga perlu ditanamkan disiplin dan membekalinya dengan berbagai keahlian dan keterampilan.

Jika dibandingkan dengan konsep Pendidikan Islam, terdapat perbedaan besar antara konsep John Dewey yang mengembangkan konsep filsafat pragmatisme dengan konsep Pendidikan Islam sendiri, yaitu bahwa konsep Dewey tidak menunjukkan proses pendalaman agama, proses mengenal pencipta manusia, dan proses mengenal dirinya sendiri, serta tidak menunjukkan dan mengarahkan pada ketentuan Tuhan dan kebenaran-Nya. Tampak bahwa sosial inilah orientasi pendidikannya. Masyarakatlah yang akan membuat ketentuan-ketentuan atau peraturan dalam kehidupan. Dari sini sekaligus menunjukkan bahwa pendidikan menurut Dewey hanya mengarah kepada kehidupan dunia saja. Seolah tidak ada lagi kehidupan sesudah manusia mati.

Dalam pandangan Islam, Konsep pendidikan Islam mempunyai dua orientasi pendidikan, yaitu orientasi kehidupan duniawiyah dan orientasi kehidupan ukhrawiyah. Karena proses pendidikan dalam Islam mengorientasikan manusia untuk mencapai tujuan hidupnya, yaitu bahagia dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Meskipun terdapat perbedaan besar, namun ada beberapa relevansi antara konsep Dewey dengan Pendidikan Islam, atau bahkan Islam itu sendiri. Pertama, paradigma yang ditekankan oleh konsep Dewey adalah faktor manusia dan struktur tradisi opresif yang harus diubah. Manusia dalam pandangannya merupakan subyek dan pelaku sejarah, bukan sebagai obyek yang ada dalam sejarah. Untuk benar-benar menjadi subyek dan pelaku sejarah maka kebebasan sebagai kondisi ontologis

---

<sup>3</sup> Mubarak.

<sup>4</sup> Mubarak.

yang melekat pada manusia harus dipertahankan. Sehingga ia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan artikulasi kesadarannya dalam memaknai kehidupannya. Inilah yang membuat manusia dapat beraksi dan berefleksi, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain (binatang). Hal tersebut juga dapat dijumpai di dalam Islam, di mana Islam dalam konsep pendidikannya menekankan aspek manusia sebagai subyek dalam pendidikan. Islam juga menempatkan manusia sebagai makhluk historis yang berbeda dengan binatang yang a-historis, sebab manusia mempunyai kelebihan dan kesempurnaan yang diberikan oleh Allah kepadanya, sebagaimana yang termuat dalam al-Qur'an surat al-Tiin ayat 4, yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

*Artinya: "Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".*

Selain itu Islam juga memaknai kebebasan sebagai fitrah manusia, yakni kehendak bebas sebagai nilai dasar yang harus dijaga dan harus dihormati serta dipertahankan. Implikasi dalam hal ini adalah menuntut seseorang agar menjadi manusia yang aktif dalam pendidikan maupun dalam bekerja, sebab Islam tidak menyukai orang yang hanya pasrah (pasif) dan tidak mau berikhtiar. Padahal dengan tindakan yang aktif baik dengan aksi maupun refleksi, manusia akan menjadi manusia yang sesungguhnya. Allah sendiri tidak akan mengubah manusia untuk menjadi manusia yang sebenarnya kalau tidak manusianya sendiri yang mengubahnya, sebagaimana yang tergambar dalam al-Ra'd ayat 11, yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

*Artinya: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri".*

Untuk dapat menjadi manusia yang sebenarnya, manusia tentu sangat membutuhkan pendidikan, karena pendidikanlah yang akan menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang

berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia nomor wahid. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan tentang tujuan pendidikan yakni mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis juga bertanggung jawab.

Di zaman modern sekarang, tentunya banyak tantangan untuk dapat mewujudkan tujuan besar pendidikan tersebut. Perkembangan zaman, arus globalisasi yang begitu cepat, dan era digital yang semakin luas, tentu menjadi tantangan yang sangat besar bagi semua pihak yang berkepentingan dan berkecimpung di dunia pendidikan, terutama bagi guru. Tentunya kehadiran seorang guru yang mempunyai karakter sangat diperlukan dalam situasi seperti sekarang.

Bangsa yang masyarakatnya tidak siap hampir bisa dipastikan akan jatuh oleh dahsyatnya perubahan alam dan kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Untuk bisa berperan secara bermakna pada era globalisasi di abad ke-21 ini, maka setiap warga negara dituntut untuk memiliki kemampuan yang dapat menjawab tuntutan perkembangan zaman. Pembelajaran abad 21 merupakan suatu peralihan pembelajaran dimana kurikulum yang dikembangkan menuntun sekolah untuk mengubah pendekatan pembelajaran dari *teacher centred* menjadi *student centered*. Hal ini sesuai dengan tuntutan masa depan dimana peserta didik harus memiliki kecakapan berpikir dan belajar. Kecakapan-kecakapan tersebut antara lain kecakapan memecahkan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan kecakapan berkomunikasi.

Konsep pembelajaran abad ke-21 menggunakan 4C, yaitu *critical thinking and problem solving* (berpikir kritis & pemecahan masalah), *creativity and innovation* (daya cipta dan inovasi), *collaboration* (kerjasama), dan *communication* (komunikasi).

Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi dan melakukan penelitian ilmiah. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpendapat dengan cara yang terorganisasi. Berpikir kritis merupakan kemampuan untuk mengevaluasi secara sistematis bobot pendapat pribadi dan pendapat orang lain. Berpikir kritis secara esensial adalah proses aktif dimana seseorang memikirkan berbagai hal secara mendalam, mengajukan pertanyaan untuk diri sendiri, menemukan informasi yang relevan untuk diri sendiri daripada menerima berbagai hal dari orang lain. Dalam konsep ini peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Peran peserta didik dalam penerapan pembelajaran abad 21 adalah belajar secara kolaboratif, belajar berbasis masalah, memiliki kemampuan *high order thinking*, serta belajar mengajukan pertanyaan.

*Creativity* tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir *outside the box* tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Anak-anak yang memiliki kreativitas tinggi mampu berpikir dan melihat suatu masalah dari berbagai sisi atau perspektif. Hasilnya, mereka akan berpikiran lebih terbuka dalam menyelesaikan masalah. Pada konsep ini peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada.

*Collaboration* adalah aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Aktivitas ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran agar anak mampu dan siap untuk bekerja sama dengan siapa saja dalam kehidupannya mendatang. Saat berkolaborasi bersama orang lain, anak akan terlatih untuk mengembangkan solusi terbaik yang bisa diterima oleh semua orang dalam kelompoknya. Konsep

kerjasama akan mengajak peserta didik untuk belajar membuat kelompok, menyesuaikan dan kepemimpinan. Tujuan kerjasama ini agar peserta didik mampu bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati dan bersedia menerima pendapat yang berbeda. Manfaat lain dari kerjasama ini untuk melatih peserta didik agar bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa menentukan target yang tinggi untuk kelompok dan individu.

*Communication* dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara cepat, jelas, dan efektif. Keterampilan ini terdiri dari sejumlah sub-skill, seperti kemampuan berbahasa yang tepat sasaran, kemampuan memahami konteks, serta kemampuan membaca pendengar (*audience*) untuk memastikan pesannya tersampaikan. Dalam hal ini peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan membangun komunikasi yang baik dan benar baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Peserta didik diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi hingga memecahkan masalah yang ada.

Untuk dapat mewujudkan konsep pembelajaran tersebut, tentunya diperlukan kehadiran seorang guru yang memiliki karakteristik guru abad 21, yaitu:

- 1) *Life-long learner* atau pembelajar seumur hidup. Guru perlu meng-*upgrade* terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya pada para ahli. Tak pernah ada kata puas dengan pengetahuan yang ada, karena zaman terus berubah dan guru wajib *up to date* agar dapat mendampingi siswa berdasarkan kebutuhan mereka;
- 2) Kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharap mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas;
- 3) Mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri dari model pembelajaran abad 21 adalah *blended learning*, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan sesuatu yang sifatnya *additional*, bahkan wajib;

- 4) Reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi mengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Ada berapa guru yang tak pernah peka bahkan setelah mengajar bertahun-tahun bahwa pendekatannya tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang reflektif mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa, bukan malah terus menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran;
- 5) Kolaboratif. Ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada *mutual respect* dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak;
- 6) Menerapkan *student centered*. Ini adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karenanya, dalam kelas abad 21 metode ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa;
- 7) Menerapkan pendekatan *diferensiasi*. Dalam menerapkan pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa. pengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Dalam melakukan penilaian guru menerapkan *formative assessment* dengan menilai siswa secara berkala berdasarkan performanya (tak hanya tes tulis). Tak hanya itu, guru bersama siswa berusaha untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran.

Peran guru dalam pembelajaran abad 21 sangat krusial untuk bisa menjalankan pendekatan STEM pada pembelajaran. Maka dari itu, guru abad 21

harus bisa lebih kreatif dan juga inovatif dalam mengembangkan suatu metode belajar. Metode-metode berikut ini kemudian banyak digunakan oleh guru pada praktik pembelajaran:

- 1) *Student Centered*. Pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran akan mengikuti karakter siswa. Baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung berperan sebagai fasilitator;
- 2) *Discovery Learning*. *Discovery learning* adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk bisa belajar secara aktif dan mandiri (*self learning*). Memanfaatkan *source* yang ada untuk menggali, menyelidiki, hingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Metode ini juga berguna untuk merangsang *critical thinking* dan *problem solving*. Peserta didik juga akan terdorong untuk bisa menjalankan *life-long learning*;
- 3) *Flipped Classroom*. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian, ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep, dan juga wadah untuk kolaborasi;
- 4) *Project Based Learning*. Metode ini “menceburkan” siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif;
- 5) *Collaborative Learning*. Salah satu ciri industri 4.0 yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan social;

- 6) *Blended Learning*. *Blended learning* mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengkolaborasikan 2 metode pembelajaran, pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan.

Dengan segala perubahan yang sudah diuraikan diatas, maka sangat perlu bagi seorang guru untuk terus menjadi pembelajar sepanjang hayat agar bisa terus membarukan pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan hadits Rasulullah SAW:

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَعْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّىٰ الْخَيْثَانُ فِي الْمَاءِ.

"Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu, dan penghuni langit serta bumi memohonkan ampun untuknya, bahkan ikan-ikan di lautan sekalipun. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka, barang siapa mengambil ilmu, ia telah mengambil bagian yang sangat besar." (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dinyatakan sahih oleh al-Albani)

Hadits ini menunjukkan bahwa usaha mencari ilmu sepanjang hidup memiliki keutamaan yang besar, bahkan mempermudah jalan menuju surga. Sebagai salah satu kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Kementerian Agama memiliki salah satu fungsi melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang keagamaan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Agama, telah merumuskan beberapa kebijakan di bidang pendidikan madrasah. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah.

Salah satu kebijakan yang telah diluncurkan oleh Kementerian Agama untuk meningkatkan mutu madrasah di abad ke-21 ini adalah Program *Madrasah Reform Realizing Education's Promise* dan *Madrasah Education Quality Reform (REP-*

*MEQR*). Program tersebut diresmikan langsung oleh Menteri Agama Fachrul Razi secara virtual pada tanggal 21 Oktober 2020.

*REP-MEQR* merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Agama, bekerjasama dengan Bank Dunia, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Kementerian Agama. Proyek ini akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun, dimulai dengan pelaksanaan proyek pada tahun 2020 dan berakhir pada tahun 2024. Pelaksanaan proyek didanai oleh Bank Dunia sebesar Rp. 3.75 Triliun (USD 250 juta), dengan empat komponen kegiatan, yaitu:

- 1) Penerapan sistem *e-RKAM* (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik) dan pemberian bantuan untuk madrasah;
- 2) Penerapan sistem penilaian hasil belajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) bagi seluruh peserta didik kelas 5 MI secara nasional;
- 3) Kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru, kepala madrasah, dan tenaga kependidikan madrasah untuk peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;

Kehadiran program *REP-MEQR*, terutama komponen ketiga, tentunya sangat mendukung pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru, yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama pada tahun 2018 melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru.

Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru adalah pengembangan kompetensi bagi guru sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan, serta bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Guru dalam mengemban tugas sebagai pendidik.

Komponen 3 program *REP-MEQR* sendiri memang difokuskan kepada kebijakan dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan untuk Guru, Kepala Madrasah, dan Tenaga Kependidikan Madrasah. Diharapkan dengan adanya peningkatan akses terhadap pelatihan yang bermutu akan mendorong terjadinya peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.

Untuk meningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, Komponen 3 fokus pada penguatan dan perluasan akses kegiatan bagi kelompok kerja melalui pemberian bantuan dan pengembangan modul pelatihan. Pemberian bantuan kepada kelompok kerja digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, dengan membangun komunitas belajar guru yang paling dekat dengan tempat kerja mereka. Strategi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam diharapkan dapat memberi arah pengembangan, inisiatif, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan kompetensi secara sistematis dan berkelanjutan dalam wadah guru dan tenaga kependidikan.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat diidentifikasi bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai pendidik, guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Tugas ini menuntut guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya agar mampu menghadapi tantangan pendidikan yang dinamis. Dalam era globalisasi, kebutuhan terhadap guru yang kompeten semakin mendesak, mengingat perkembangan teknologi, perubahan kurikulum, dan dinamika sosial budaya yang memengaruhi dunia pendidikan. Kompetensi profesional guru menjadi hal penting untuk memastikan kualitas pembelajaran tetap terjaga seiring dengan meningkatnya tuntutan tersebut<sup>5</sup>.

Namun, kompetensi profesional guru di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa guru harus memiliki empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial<sup>6</sup>. Meski demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak guru yang kesulitan memenuhi standar tersebut akibat kurangnya pelatihan yang relevan dan berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akses terhadap pelatihan, terutama di

---

<sup>5</sup> Dedi Supriadi, *Mengelola Pendidikan di Era Globalisasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 45.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat (1).

daerah rural seperti Kabupaten Bandung Barat, masih terbatas<sup>7</sup>. Kondisi ini memengaruhi kemampuan guru untuk mempertahankan keberlanjutan profesinya, baik dari segi kinerja maupun motivasi.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengembangkan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB). Program ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan yang berfokus pada penguatan kurikulum, penguasaan teknologi pendidikan, dan pengembangan strategi pembelajaran modern<sup>8</sup>. Selain itu, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme guru dalam menghadapi tuntutan pendidikan yang semakin kompleks. Pelaksanaan PKB ini menjadi salah satu program prioritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat<sup>9</sup>.

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, sebagai salah satu unit eselon III Kementerian Agama, memiliki peran untuk memberikan pelayanan pendidikan madrasah, yang salah satunya adalah melakukan bimbingan dan pembinaan untuk peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Salah satu strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung Barat adalah dengan membentuk Kelompok Kerja Madrasah (KKM), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), yang tentunya sejalan dengan program Kementerian Agama melalui *REP-MEQR* nya. Organisasi profesi tersebut telah menerima bantuan dari *REP-MEQR* pada tahun 2021 dan tahun 2022, yang dikelola dan digunakan untuk melaksanakan bimbingan teknis Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), yang diharapkan hasil akhirnya dapat meningkatkan mutu pendidikan madrasah di Kabupaten Bandung Barat.

Guru-guru di wilayah ini tergabung dalam beberapa Kelompok Kerja Guru (KKG) yang mencakup jenjang pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan berbagai

---

<sup>7</sup> Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan, *Laporan Penelitian Kompetensi Guru di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022), 78.

<sup>8</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Program PKB Guru Madrasah* (Jakarta: Kemenag RI, 2022), 23.

<sup>9</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia

mata pelajaran. Berdasarkan data administratif, setiap kelompok kerja memiliki nomor registrasi resmi yang mencerminkan keaktifan mereka dalam program pelatihan yang dilaksanakan. Sebagai contoh, KKG Bandung Barat Jawa Barat 0005 memiliki nomor SK 067 Tahun 2023 dengan nomor registrasi KKG-177-0005<sup>10</sup>. Meskipun pelaksanaan program PKB di lingkungan ini berjalan secara sistematis, efektivitasnya terhadap kompetensi profesional guru masih menjadi pertanyaan yang memerlukan kajian lebih lanjut.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelatihan yang relevan dan sesuai kebutuhan lokal dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja dan motivasi guru<sup>11</sup>. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara spesifik mengukur pengaruh kebijakan program PKB terhadap kompetensi profesional guru di Kabupaten Bandung Barat. Padahal, memahami hubungan antara kebijakan pelatihan terhadap kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik guru sangat penting untuk memberikan rekomendasi yang berbasis data bagi pengambilan kebijakan pendidikan di masa depan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan terhadap kompetensi profesional dan kompetesni paedagogik guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap perbaikan kebijakan pendidikan, baik di tingkat lokal maupun nasional, khususnya dalam mendukung kompetensi profesional guru dan kompetensi paedagogik sebagai ujung tombak pendidikan di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat?

---

<sup>10</sup> Data Kelompok Kerja Guru (KKG), Kabupaten Bandung Barat, file internal, diakses 23 November 2024.

<sup>11</sup> Ahmad Syukri, "Dampak Pelatihan Guru terhadap Kinerja dan Motivasi Mengajar," *Jurnal Pendidikan Profesional* 12, no. 1 (2021): 45-58.

2. Bagaimana pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi profesional guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat?
3. Bagaimana pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi pedagogik guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat?
4. Bagaimana pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Implementasi program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
2. Pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi profesional guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
3. Pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi pedagogik guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.
4. Pengaruh program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru di lingkungan KKG Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis, yaitu:

- a. Untuk memberikan informasi tentang implementasi kebijakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - b. Untuk memberikan informasi mengenai manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan.
  - c. Sebagai tambahan bahan kajian dan informasi tentang manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru dan kepala madrasah, khususnya bagi madrasah yang belum aktif menyelenggarakan program pengembangan keprofesian berkelanjutan.
2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya tentang manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat diterapkan di madrasah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan mutu atau nilai madrasah.
- b. Memberikan kontribusi bagi para lembaga pendidikan tentang manajemen pengembangan keprofesian berkelanjutan.
- c. Memberikan sumbangan bagi khasanah keilmuan terhadap lembaga pendidikan khususnya bagi sekolah yang digunakan.

#### **E. Kerangka Berpikir**

##### **1. Kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB)**

Implementasi merupakan faktor yang sangat penting dalam rangkaian kebijakan, termasuk dalam implementasi kebijakan Pendidikan. Implementasi kebijakan Pendidikan saling berkaitan antara pelaksanaan program kegiatan bertanggung jawab terhadap badan administratif kegiatan. Selain itu implementasi Pendidikan juga dalam prosesnya saling berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan politik, baik langsung maupun tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan program. Tujuan implementasi kebijakan yakni untuk menetapkan arah supaya tujuan kebijakan dapat diimplementasikan. Dalam prosesnya, implementasi kegiatan terdapat beberapa hal yang harus dilalui, seperti pendekatan dan strategi

yang harus ditempuh. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan Pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan deretan kebijakan yang dibuat pemerintah atau lembaga pendidikan sebagai upaya meningkatkan kualitas dan kesempatan pendidikan pada suatu negara atau wilayah<sup>12</sup>. Kebijakan pendidikan tersebut berkaitan dengan pengaturan kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Kebijakan Pendidikan tidak terlepas dari hakikat manusia untuk keberlangsungan hidupnya.<sup>13</sup> Kebijakan sebagai tujuan dari keberlangsungan hidup manusia diwujudkan dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan pendidikan adalah kegiatan penerapan dan pelaksanaan kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui bersama. Hal tersebut mencakup serangkaian langkah mulai dari perencanaan, pemerintah dan lembaga terkait menyusun rencana untuk menguraikan tujuan, strategi, dan langkah-langkah untuk melaksanakan kebijakan pendidikan. Implementasi ini mencakup pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dirumuskan melalui berbagai kegiatan dan ide-ide seperti peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru dan siswa, peningkatan kurikulum, dan lain-lain. Pemantauan merupakan bagian integral untuk memastikan pelaksanaan kebijakan pendidikan yang efektif.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dianalisis menggunakan teori kebijakan yang dikembangkan oleh *Merilee S. Grindle*. Teori ini menawarkan kerangka konseptual yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada dua faktor utama, yaitu Isi Kebijakan (*Content of Policy*) dan Konteks Implementasi (*Context of Implementation*). Pendekatan ini menjadi relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan PKB dirancang, dijalankan, dan dievaluasi, khususnya dalam konteks peningkatan kualitas guru.

---

<sup>12</sup> Alber Tanjung and others, 'Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik', *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8.2 (2023), 546 <<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24712>>.

<sup>13</sup> A Rusdiana, 'Kebijakan Pendidikan Nasional', *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2014, 139.

<sup>14</sup> Tanjung and others.

Pada aspek Isi Kebijakan (*Content of Policy*), Grindle menyoroti empat elemen penting yang harus diperhatikan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Pertama, tujuan kebijakan (*objectives*) yang menjadi orientasi utama dari kebijakan tersebut. Dalam kebijakan PKB, tujuan utama adalah meningkatkan kompetensi profesional guru melalui proses yang terstruktur dan berkelanjutan. Kedua, jenis manfaat yang diberikan (*types of benefits*), yaitu keuntungan yang dirasakan oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini, manfaat dari PKB mencakup peningkatan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru, yang pada akhirnya diharapkan berdampak positif pada kualitas pembelajaran di sekolah. Ketiga, penerima manfaat (*target groups*) yang menjadi fokus dari kebijakan. Dalam konteks PKB, target utamanya adalah guru sebagai aktor kunci dalam penyelenggaraan pendidikan. Keempat, sumber daya yang dialokasikan (*resources committed*), mencakup alokasi anggaran, tenaga pelatih, waktu pelaksanaan, dan infrastruktur pendukung yang digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan<sup>15</sup>.

Sementara itu, aspek Konteks Implementasi (*Context of Implementation*) dalam teori Grindle menekankan pentingnya memahami lingkungan dan faktor-faktor eksternal yang memengaruhi keberhasilan kebijakan. Elemen pertama adalah pelaksana kebijakan (*implementing organizations*), yaitu institusi atau individu yang bertanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam hal ini, pelaksana kebijakan PKB meliputi Kementerian Agama, lembaga pelatihan guru, serta pihak-pihak terkait lainnya. Elemen kedua adalah karakteristik kelompok sasaran, yang meliputi kebutuhan, kapasitas, serta respons kelompok penerima manfaat terhadap kebijakan tersebut. Guru sebagai kelompok sasaran kebijakan PKB memiliki beragam karakteristik, mulai dari latar belakang pendidikan hingga motivasi untuk mengikuti pelatihan. Elemen ketiga adalah tingkat dukungan politik, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dukungan politik ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dijalankan secara konsisten. Elemen terakhir adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang

---

<sup>15</sup> Merilee S. Grindle, *Politics and Policy Implementation in the Third World* (Princeton: Princeton University Press, 1980), 17.

membentuk konteks implementasi kebijakan. Dalam kebijakan PKB, kondisi sosial meliputi kesadaran akan pentingnya pendidikan, kondisi ekonomi berkaitan dengan ketersediaan anggaran, sementara kondisi politik mencerminkan stabilitas dan komitmen pemerintah terhadap kebijakan tersebut<sup>16</sup>.

Dalam konteks penelitian ini, PMA No. 38 Tahun 2018 menjadi dasar regulasi utama dalam kebijakan PKB. Regulasi ini secara eksplisit mengatur tentang mekanisme pengembangan keprofesian guru yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tiga komponen utama, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pertama, pengembangan diri mencakup partisipasi guru dalam berbagai kegiatan peningkatan kompetensi, seperti pelatihan, seminar, dan workshop, yang bertujuan untuk memperbarui dan memperdalam pengetahuan serta keterampilan mereka. Kedua, publikasi ilmiah merupakan upaya untuk mendorong guru agar aktif dalam menghasilkan karya tulis yang dipublikasikan, baik dalam bentuk laporan penelitian tindakan kelas maupun artikel ilmiah di jurnal nasional atau internasional. Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akademik guru sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pendidikan. Ketiga, karya inovatif melibatkan pengembangan media pembelajaran, metode pengajaran baru, atau teknologi pendidikan yang relevan dengan kebutuhan siswa di era digital. Ketiga komponen ini saling melengkapi dan menjadi indikator utama untuk menilai keberhasilan kebijakan PKB dalam meningkatkan kompetensi profesional guru<sup>17</sup>.

Penerapan teori Grindle dalam analisis kebijakan PKB memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan ini dirancang dan diimplementasikan dalam kerangka sistem pendidikan di Indonesia. PMA No. 38 Tahun 2018 menetapkan bahwa keberhasilan PKB tidak hanya bergantung pada isi kebijakan yang dirumuskan, tetapi juga pada konteks implementasi yang mendukung pelaksanaannya. Oleh karena itu, kebijakan ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat,

---

<sup>16</sup> Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New York: Pearson, 2019), 245.

<sup>17</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Peraturan Menteri Agama No. 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), Pasal 5.

untuk memastikan bahwa guru memiliki kapasitas yang memadai dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan<sup>18</sup>.

Kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru secara terus-menerus. Dalam perspektif manajemen pendidikan, implementasi PKB dapat dianalisis melalui pendekatan teori manajemen strategis, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dukungan institusi sebagai pilar utama keberhasilan suatu kebijakan<sup>19</sup>. Keempat aspek ini sejalan dengan tahapan dalam siklus manajemen pendidikan, yang terdiri dari perencanaan strategis, implementasi kebijakan, monitoring dan evaluasi, serta penguatan dukungan institusional<sup>20</sup>.

#### **a. Perencanaan Program PKB**

Perencanaan merupakan tahap awal yang krusial dalam implementasi kebijakan PKB. Dalam konteks teori perencanaan strategis, tahap ini bertujuan untuk menentukan arah kebijakan berdasarkan kebutuhan guru dan kondisi pendidikan yang berkembang<sup>21</sup>. Indikator utama dalam perencanaan PKB meliputi:

- 1) Kesesuaian program pelatihan dengan kebutuhan guru, yang dianalisis melalui survei kebutuhan (*need assessment*) sebelum pelaksanaan pelatihan.
- 2) Keterlibatan guru dalam identifikasi kebutuhan pelatihan, yang menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam menentukan topik pelatihan<sup>22</sup>.
- 3) Ketersediaan anggaran dan sumber daya pendukung, termasuk alokasi dana pelatihan, tenaga pelatih profesional, dan sarana prasarana yang memadai.

Perencanaan yang efektif memastikan bahwa materi pelatihan relevan dengan tantangan pendidikan modern, seperti penguasaan teknologi pembelajaran,

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 112.

<sup>19</sup> Stephen P. Robbins, *Management* (New York: Pearson, 2018), 221.

<sup>20</sup> Lorin W. Anderson, *Strategic Management in Education* (New York: Routledge, 2019), 45.

<sup>21</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 67.

<sup>22</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), 112.

penguatan kompetensi pedagogik, serta pemanfaatan inovasi dalam proses belajar mengajar<sup>23</sup>.

#### **b. Pelaksanaan Program PKB**

Tahap pelaksanaan merupakan inti dari implementasi kebijakan ini. Berdasarkan teori manajemen operasional dalam pendidikan, efektivitas program PKB ditentukan oleh efisiensi dalam penyelenggaraan pelatihan dan keterlibatan aktif peserta<sup>24</sup>. Indikator utama dalam tahap ini mencakup:

- 1) Metode pelatihan yang digunakan, baik melalui lokakarya, seminar, *mentoring*, atau *coaching* yang bersifat interaktif dan berbasis praktik.
- 2) Tingkat partisipasi guru dalam kegiatan pelatihan, yang diukur berdasarkan kehadiran serta keterlibatan mereka dalam diskusi dan praktik pembelajaran.
- 3) Relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan profesional guru, terutama dalam meningkatkan kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian.

Keberhasilan tahap ini ditandai dengan tingginya tingkat kehadiran guru dan partisipasi aktif mereka dalam seluruh rangkaian pelatihan. Selain itu, pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam pendidikan menekankan bahwa program pelatihan harus mempertimbangkan aspek motivasi intrinsik dan ekstrinsik untuk meningkatkan komitmen guru dalam mengikuti PKB<sup>25</sup>.

#### **c. Evaluasi Program PKB**

Evaluasi menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan PKB. Menurut teori evaluasi kebijakan pendidikan, tahap ini mencakup pemantauan terhadap hasil pelatihan, sistem *feedback* dari peserta, serta dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi guru<sup>26</sup>. Indikator utama dalam evaluasi PKB meliputi:

---

<sup>23</sup> Gary Yukl, *Leadership in Organizations* (Boston: Pearson, 2013), 98.

<sup>24</sup> Philip Kotler, *Marketing for Educational Institutions* (New York: Prentice Hall, 2001), 156.

<sup>25</sup> Fred Lunenburg and Allan Ornstein, *Educational Administration: Concepts and Practices* (Belmont: Wadsworth, 2012), 89.

<sup>26</sup> Daniel Stufflebeam, *Educational Evaluation and Decision Making* (Bloomington: Phi Delta Kappa, 2003), 211.

1. Pemantauan terhadap hasil pelatihan, yang dilakukan melalui asesmen kompetensi pasca-pelatihan.
2. Sistem *feedback* dari peserta, yang bertujuan untuk mengukur kepuasan guru terhadap materi, metode, dan fasilitator pelatihan.
3. Dampak pelatihan terhadap peningkatan kompetensi guru, yang dianalisis melalui observasi praktik mengajar dan pencapaian hasil belajar siswa.

Evaluasi yang dilakukan secara sistematis dapat membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program sehingga kebijakan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan di masa depan. Selain itu, model evaluasi berbasis data menjadi pendekatan yang semakin diterapkan dalam pendidikan untuk memastikan efektivitas kebijakan secara objektif<sup>27</sup>.

#### **d. Dukungan Institusi**

Dukungan institusi, baik dari kepala madrasah, pengawas pendidikan, maupun Kelompok Kerja Guru (KKG), menjadi indikator penting dalam keberhasilan pelaksanaan PKB. Dalam teori kepemimpinan pendidikan, dukungan institusional berperan dalam membangun budaya akademik yang mendukung pengembangan profesional guru<sup>28</sup>. Indikator utama dalam aspek ini meliputi:

- 1) Penyediaan fasilitas dan sumber daya pendukung, seperti laboratorium komputer, akses ke bahan ajar, dan *platform e-learning*.
- 2) Kemudahan administratif, yang mencakup fleksibilitas dalam izin mengikuti pelatihan serta insentif bagi guru yang berpartisipasi aktif.
- 3) Motivasi bagi guru untuk mengikuti pelatihan, baik dalam bentuk penghargaan, tunjangan profesi, maupun pengakuan akademik dari institusi pendidikan.

Di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat, KKG memainkan peran sentral sebagai wadah kolaborasi dan penguatan profesionalisme guru. Model pengembangan komunitas profesional (*professional learning*

---

<sup>27</sup> Donald Kirkpatrick, *Evaluating Training Programs: The Four Levels* (San Francisco: Berrett-Koehler, 2016), 143.

<sup>28</sup> John P. Kotter, *Leading Change* (Boston: Harvard Business School Press, 1996), 75.

*community*) menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam membangun jejaring kerja sama antar-guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran<sup>29</sup>.

Indikator-indikator di atas mencerminkan implementasi kebijakan PKB yang terukur, mulai dari perencanaan hingga evaluasi dan dukungan institusi. Pendekatan teori manajemen strategis dalam pendidikan memberikan perspektif yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan PKB dapat dioptimalkan melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efektif, evaluasi berbasis data, dan penguatan dukungan institusi<sup>30</sup>. Dengan demikian, keseluruhan aspek ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan PKB memberikan dampak positif terhadap pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

## **2. Kompetensi Profesional guru**

Kompetensi profesional guru merupakan salah satu elemen utama dalam membangun kualitas pendidikan. Kompetensi ini merujuk pada kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan yang luas tentang bidang studi yang diajarkan, memahami perkembangan peserta didik, serta menerapkan metode pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi secara mendalam yang mencakup penguasaan kurikulum, materi ajar, serta kemampuan mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif dan inovatif. Kompetensi ini merupakan salah satu dari empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, selain kompetensi pedagogik, kepribadian, dan sosial<sup>31</sup>.

Menurut Mulyasa, kompetensi profesional dapat diukur melalui penguasaan guru terhadap bidang studi yang diajarkan dan kemampuan mentransformasikannya dalam pembelajaran<sup>32</sup>. Guru yang kompeten secara profesional diharapkan mampu mengembangkan materi pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik dan

---

<sup>29</sup> Richard DuFour, *Professional Learning Communities at Work* (Bloomington: Solution Tree Press, 2009), 32.

<sup>30</sup> Robert Kaplan and David Norton, *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action* (Boston: Harvard Business Review Press, 1996), 125.

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10 Ayat 1.

<sup>32</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 32.

perkembangan zaman. Hal ini termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sebagai upaya menjawab tantangan abad ke-21<sup>33</sup>. Dengan demikian, kompetensi profesional tidak hanya melibatkan penguasaan materi, tetapi juga kemampuan untuk mengadaptasikan pembelajaran dengan konteks dan kebutuhan masyarakat modern.

Lebih lanjut, Robbins menyatakan bahwa kompetensi profesional guru juga dipengaruhi oleh pelatihan dan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Pelatihan semacam ini memberikan kesempatan bagi guru untuk memperbarui pengetahuan mereka, meningkatkan keterampilan, dan memperluas wawasan mengenai pendekatan-pendekatan baru dalam pembelajaran<sup>34</sup>. Oleh karena itu, program pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) dianggap sebagai salah satu cara efektif untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Program ini dirancang untuk memberikan pelatihan berbasis kebutuhan aktual guru dalam berbagai aspek profesi, termasuk strategi pembelajaran, evaluasi, dan pengembangan materi ajar<sup>35</sup>.

Kompetensi profesional guru, akan diukur berdasarkan indikator yang mencakup tiga komponen utama, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Pemilihan indikator ini didasarkan pada standar kompetensi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam PMA No. 38 Tahun 2018 Pasal 5, tentang Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru yang menjelaskan bahwa ketiga komponen ini merupakan elemen penting dalam upaya peningkatan profesionalisme guru yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan ketiga komponen ini, kebijakan PKB diharapkan mampu menjawab tantangan pendidikan di era modern, khususnya dalam menghadapi perkembangan teknologi, tuntutan kompetensi abad ke-21, dan kebutuhan pembelajaran yang relevan dengan peserta didik. Dengan mengukur

---

<sup>33</sup> Mulyasa, hal. 34

<sup>34</sup> Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New Jersey: Pearson Education, 2018), hal. 245.

<sup>35</sup> Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, *Panduan Program PKB* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020), hal. 15.

indikator-indikator ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan sejauh mana kompetensi profesional guru dapat ditingkatkan melalui pelatihan PKB.

#### **a. Pengembangan Diri**

Pengembangan diri adalah upaya individu guru untuk terus meningkatkan kompetensinya melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, seminar, workshop, dan diskusi kelompok kerja. Tujuan utama dari pengembangan diri adalah untuk memperbarui wawasan, meningkatkan kemampuan, dan menyesuaikan kompetensi guru dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang pendidikan.

Pengembangan diri mencakup kegiatan yang bersifat formal maupun informal. Dalam konteks formal, pengembangan diri dapat dilakukan melalui pelatihan yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga pendidikan, seperti pelatihan berbasis kurikulum, pendidikan berbasis teknologi, dan penguatan kompetensi pedagogik. Sedangkan dalam konteks informal, guru dapat berpartisipasi dalam diskusi ilmiah, program mentoring, atau komunitas pembelajaran seperti Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)<sup>36</sup>.

Komponen ini sangat penting karena menjadi dasar dalam membangun kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian yang menjadi standar kompetensi guru sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen<sup>37</sup>.

#### **b. Publikasi Ilmiah**

Publikasi ilmiah adalah bentuk nyata dari kontribusi guru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam PMA No. 38 Tahun 2018, guru diwajibkan untuk menghasilkan karya ilmiah sebagai bagian dari tanggung jawab profesionalnya. Karya ilmiah ini mencakup penelitian tindakan kelas (PTK), artikel jurnal, laporan penelitian, dan makalah ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar atau konferensi.

---

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Peraturan Menteri Agama No. 38 Tahun 2018 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2018), Pasal 5.

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 10.

Publikasi ilmiah bukan hanya sekadar alat untuk mengukur kemampuan akademik guru, tetapi juga menjadi sarana untuk menyebarluaskan inovasi pembelajaran yang telah dikembangkan. Guru yang aktif dalam publikasi ilmiah cenderung memiliki kemampuan analisis yang lebih baik, penguasaan yang mendalam terhadap materi ajar, serta kreativitas dalam mengembangkan metode pembelajaran<sup>38</sup>.

Selain itu, publikasi ilmiah juga berfungsi sebagai dokumentasi dari proses refleksi guru terhadap praktik pengajaran. Melalui penelitian tindakan kelas, misalnya, guru dapat mengidentifikasi masalah dalam pembelajaran, merancang solusi, dan mengevaluasi efektivitas metode yang diterapkan. Dengan demikian, publikasi ilmiah menjadi alat untuk memastikan keberlanjutan profesionalisme guru melalui siklus refleksi dan inovasi<sup>39</sup>.

### **c. Karya Inovatif**

Karya inovatif adalah hasil kreativitas guru dalam mengembangkan metode, media, atau teknologi pembelajaran yang baru. Karya ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan menciptakan pembelajaran yang lebih menarik, relevan, dan efektif. Dalam PMA No. 38 Tahun 2018, karya inovatif meliputi berbagai bentuk, seperti pengembangan media pembelajaran berbasis teknologi, aplikasi digital untuk pendidikan, modul pembelajaran interaktif, hingga model pembelajaran kolaboratif.

Karya inovatif tidak hanya memperkuat kompetensi profesional guru, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap peserta didik. Media pembelajaran berbasis teknologi, misalnya, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, memperkaya pengalaman belajar, dan mendukung pencapaian hasil belajar yang lebih baik. Guru yang mampu menciptakan karya inovatif juga menunjukkan kemampuan adaptasi terhadap perkembangan zaman, yang menjadi salah satu tuntutan dalam pendidikan abad ke-21<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 124.

<sup>39</sup> Stephen P. Robbins, *Organizational Behavior* (New York: Pearson, 2019), 98.

<sup>40</sup> Philip Kotler, *Marketing for Educational Institutions* (New York: Prentice Hall, 2001), 187.

Lebih lanjut, karya inovatif juga dapat diintegrasikan dengan pendekatan pembelajaran berbasis nilai-nilai keislaman. Sebagai contoh, guru dapat mengembangkan modul pembelajaran yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi ajar, tetapi juga memperkuat pembentukan karakter Islami pada peserta didik<sup>41</sup>.

Ketiga komponen utama dalam PMA No. 38 Tahun 2018—pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif—merupakan landasan penting dalam pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan. Ketiganya saling melengkapi dan memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru. Dengan menerapkan indikator-indikator ini, diharapkan guru tidak hanya mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, tetapi juga menjadi inovator dalam dunia pendidikan yang dapat menciptakan pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi peserta didik.

Kebijakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kompetensi profesional guru secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan. Program ini memiliki keterkaitan yang erat dengan peningkatan kompetensi guru dalam menjalankan tugas profesional mereka, terutama dalam menghadapi tantangan pendidikan abad ke-21. Dengan merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 38 Tahun 2018 Pasal 5, PKB mencakup tiga komponen utama, yaitu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Ketiga komponen ini dirancang untuk memperbarui pengetahuan guru, meningkatkan keterampilan mereka, serta menguatkan kapasitas profesional yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pengembangan diri menjadi salah satu aspek penting dalam kebijakan PKB. Guru didorong untuk terus memperbarui pengetahuan dan keterampilannya melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, seminar, dan diskusi ilmiah. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Dengan mengikuti pengembangan diri, guru dapat

---

<sup>41</sup> Mohamad Ali, *Guru dalam Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 43.

memperkuat penguasaan terhadap materi ajar serta menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa yang beragam. Selain itu, pengembangan diri membantu guru untuk lebih siap menghadapi tantangan kurikulum yang dinamis dan perubahan teknologi yang pesat.

Publikasi ilmiah menjadi komponen kedua dalam PKB. Guru diharapkan mampu menghasilkan karya tulis yang dipublikasikan dalam bentuk penelitian tindakan kelas, artikel jurnal, atau makalah ilmiah. Publikasi ilmiah ini tidak hanya menjadi alat untuk mengukur kemampuan akademik guru, tetapi juga menjadi sarana bagi mereka untuk merefleksikan praktik pembelajaran yang telah dilakukan. Melalui publikasi ilmiah, guru dapat berbagi inovasi pembelajaran yang mereka kembangkan, sehingga berkontribusi pada pengembangan ilmu pendidikan secara lebih luas. Kegiatan ini juga memperkuat pemahaman teoritis guru terhadap materi ajar, yang berdampak positif pada kemampuan mereka dalam mengintegrasikan teori dan praktik di ruang kelas.

Komponen terakhir dari PKB adalah karya inovatif. Karya ini mencerminkan kreativitas guru dalam mengembangkan metode, media, atau teknologi pembelajaran yang baru dan relevan dengan kebutuhan siswa. Guru yang mampu menciptakan karya inovatif menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perkembangan zaman. Contohnya adalah pengembangan modul pembelajaran berbasis teknologi atau media interaktif yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Karya inovatif juga menjadi salah satu cara bagi guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan bermakna bagi siswa.

Ketiga komponen tersebut berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kompetensi profesional guru, yang mencakup penguasaan materi ajar, kemampuan mengembangkan materi pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi hasil pembelajaran. Program PKB memastikan bahwa peningkatan kompetensi ini tidak bersifat sementara, melainkan terus berkembang seiring waktu. Dengan demikian, implementasi yang efektif dari kebijakan PKB menjadi faktor utama yang memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Kompetensi selanjutnya adalah kompetensi pedagogik yang merupakan salah satu kompetensi utama yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik profesional. Menurut Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru, kompetensi pedagogik didefinisikan sebagai kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kemampuan ini mencakup berbagai aspek yang esensial dalam proses pembelajaran.

Secara lebih rinci, Pasal 3 ayat (4) dari peraturan tersebut menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik guru setidaknya meliputi delapan aspek utama sebagai berikut:

- a. **Pemahaman Wawasan atau Landasan Kependidikan:** Seorang guru harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai teori dan prinsip kependidikan. Wawasan kependidikan mencakup filsafat pendidikan, psikologi perkembangan peserta didik, serta pendekatan dan strategi pembelajaran yang efektif. Pemahaman ini penting agar guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik.
- b. **Pemahaman terhadap Peserta Didik:** Guru harus mampu mengenali karakteristik peserta didik secara individual, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Pemahaman ini mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan latar belakang ekonomi peserta didik, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka.
- c. **Pengembangan Kurikulum atau Silabus:** Kompetensi pedagogik juga mencakup kemampuan dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan standar pendidikan nasional. Guru bertanggung jawab untuk menyusun perangkat pembelajaran yang mencakup tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan evaluasi agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif.
- d. **Perancangan Pembelajaran:** Guru harus memiliki keterampilan dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik. Hal ini mencakup penyusunan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP), pemilihan strategi, metode, serta teknik pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada peserta didik.

- e. **Pelaksanaan Pembelajaran yang Mendidik dan Dialogis:** Guru harus mampu melaksanakan pembelajaran yang tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan tetapi juga membangun karakter dan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Pembelajaran harus bersifat interaktif, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang menciptakan suasana belajar yang kondusif dan dialogis.
- f. **Pemanfaatan Teknologi Pembelajaran:** Dalam era digital, guru harus memiliki keterampilan dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran secara optimal. Penggunaan media berbasis teknologi informasi, seperti e-learning, presentasi digital, video pembelajaran, serta platform pembelajaran daring, dapat meningkatkan efektivitas dan daya tarik proses pembelajaran.
- g. **Evaluasi Hasil Belajar:** Guru memiliki tugas untuk melakukan evaluasi terhadap hasil belajar peserta didik. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui berbagai metode asesmen, baik formatif maupun sumatif, guna mengukur tingkat pemahaman dan capaian pembelajaran peserta didik. Evaluasi yang baik harus objektif, transparan, dan mampu memberikan umpan balik konstruktif bagi peserta didik.
- h. **Pengembangan Peserta Didik untuk Mengaktualisasikan Potensinya:** Guru tidak hanya bertanggung jawab atas aspek akademik peserta didik, tetapi juga dalam membantu mereka mengembangkan potensi yang dimiliki. Guru berperan dalam membimbing dan mendorong peserta didik untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka, baik dalam bidang akademik maupun non-akademik, agar dapat berkembang secara optimal<sup>42</sup>.

Hubungan antara kebijakan PKB sebagai variabel independen (X) dan kompetensi profesional guru sebagai variabel dependen (Y) menciptakan keterkaitan sebab-akibat yang jelas. PKB berfungsi sebagai wadah bagi guru untuk mengasah keterampilan, memperbarui pengetahuan, dan meningkatkan motivasi

---

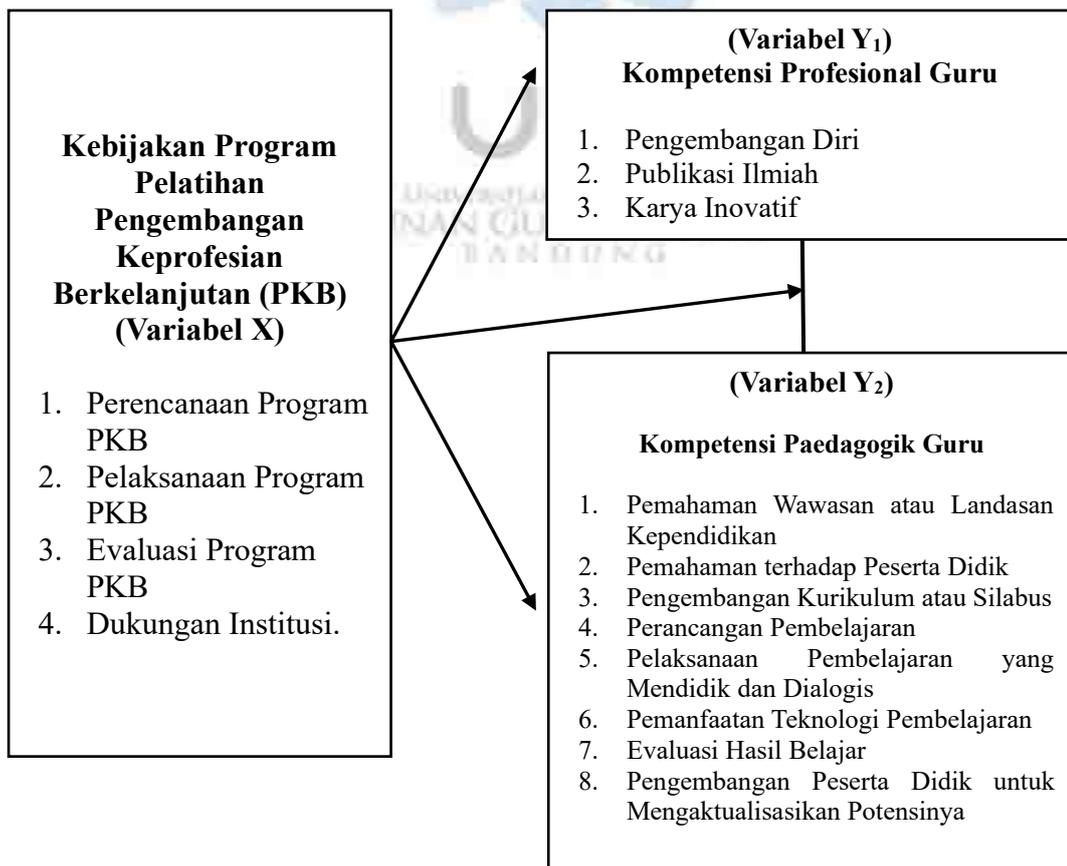
<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*, Pasal 3 ayat (4), 6.

kerja mereka. Melalui program ini, guru tidak hanya mampu memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan, tetapi juga menjadi inovator dalam dunia pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan tersebut secara empiris, dengan fokus pada implementasi kebijakan PKB di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

Dengan kerangka berpikir yang telah diuraikan, kebijakan PKB memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik guru, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia secara keseluruhan. Untuk memperjelas teori dan dimensi yang dikemukakan diatas, maka dibuat kerangka konseptual seperti pada gambar berikut:

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

**Pengaruh Kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terhadap Kompetensi Profesional dan Komptensi Paedagogik Guru**



## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian yang digunakan sebagai landasan teoritis dalam suatu penelitian untuk memahami sejauh mana permasalahan yang diteliti telah dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), membangun argumentasi akademik, serta memperkuat posisi penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan penelitian tesis ini:

1. Penelitian Nurkholis, Idham Kholid, Juhri Abdul Mu'in dan Sudarman, dengan judul "Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur" pada Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam Vol. 12 No. 02 Tahun 2023. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa implementasi program pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur meliputi: 1. Pengembangan diri guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur diimplementasikan dalam bentuk kegiatan kolektif guru yaitu melalui kegiatan pendidikan dan latihan (diklat), bimbingan teknis (Bimtek), workshop, MGMP, webinar, dan diseminasi hasil pengembangan diri guru baik melalui pengiriman dari madrasah maupun inisiatif pribadi. Program dalam upaya pengembangan diri guru Madrasah Aliyah tercakup dalam Rencana Kerja Madrasah (RKM) berdasarkan hasil analisis yang dilaksanakan oleh Tim Penjamin Mutu (TPM) madrasah sebagai penanggung jawab bidang. 2. Publikasi ilmiah guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur dilakukan dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), publikasi artikel, dan pembuatan bahan ajar berbentuk modul. Hasil publikasi ilmiah disimpan sebagai koleksi di perpustakaan madrasah serta dijadikan referensi bagi warga madrasah. dan 3. Karya inovatif guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur dilakukan melalui pembuatan media ajar sederhana dan berbasis TIK. Pihak madrasah membangun kesadaran diri guru dengan memotivasi, mendukung, dan

memfasilitasi kebutuhan guru dalam kegiatan karya inovatif yang dikembangkan<sup>43</sup>.

2. Penelitian Siti Rukayah, Noor Miyono dan Titik Haryati dengan judul “Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora” pada Jurnal *Innovative: Journal Of Social Science Research* Vol. 03 No. 06 Tahun 2023. Hasil Penelitian tersebut menyebutkan bahwa (1) terdapat pengaruh kompetensi kepala sekolah terhadap kinerja guru sebesar 40,7%; (2) terdapat pengaruh pengembangan keprofesian berkelanjutan terhadap kinerja guru sebesar 40,4%; (3) terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 61,2%; dan (4) terdapat pengaruh kompetensi kepala sekolah, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 64,8%. Saran dari peneliti adalah : (1) perlu pembinaan untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah; (2) perlu kebijakan yang dapat meningkatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan guru; dan (3) perlu kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi kerja guru<sup>44</sup>.
3. Penelitian Septiana Wulandari dan Supriyoko dengan judul “Implementasi Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Sekolah Dasar” pada jurnal *Media Manajemen Pendidikan* Vol. 5 No. 1 Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan PKB meliputi kegiatan diklat fungsional dan kegiatan kolektif guru, kegiatan publikasi ilmiah dan karya inovatif sudah cukup baik, (2) alasan guru mengikuti PKB adalah untuk meningkatkan profesionalitas mereka, (3) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan PKB berasal dari Dinas, lembaga dan diri sendiri, (4) upaya yang dilakukan guru dalam

---

<sup>43</sup> Nurkholis, Idham Kholid, Juhri Abdul Mu'in, dan Sudarman, “Implementasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Bagi Guru Madrasah Aliyah di Kabupaten Lampung Timur,” *Jurnal Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 12, no. 2 (2023): 2022-2042

<sup>44</sup> Siti Rukayah, Noor Miyono, dan Titik Haryati, “Pengaruh Kompetensi Kepala Sekolah, Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora,” *Jurnal Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 6 (2023)

mengatasi hambatan adalah dengan meningkatkan kegiatan dalam PKB serta menjadi guru yang lebih mandiri<sup>45</sup>.

4. Penelitian Abdul Rahman, Rosidah, dan Rara Nur Fadya dengan judul “Deskripsi Kompetensi Pedagogik Guru Matematika Sebagai Dampak Dari Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Bentuk MGMP Di Kabupaten Takalar” pada jurnal *Issues in Mathematics Education* Vol. 8. No. 1, Maret 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Guru kompetensi tinggi memiliki kemampuan menguasai enam aspek kompetensi pedagogik. Guru kompetensi sedang memiliki kemampuan menguasai lima aspek kompetensi pedagogik. Guru kompetensi rendah memiliki kemampuan menguasai tiga aspek kompetensi pedagogik. Pada penelitian ini MGMP sudah bisa berkontribusi pada peningkatan kemampuan kompetensi pedagogik guru. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan meningkatkan kompetensi pedagogik guru<sup>46</sup>.
5. Penelitian Dina Sartika, Tamyis, Endang Ekowati dengan judul: “Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Islam Melalui Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan” pada *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan* Vol. 3 No.1 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program dan kegiatan PKB bagi guru PAI dilaksanakan melalui berbagai cara, seperti pendidikan dan pelatihan yang mencerminkan dalam pembelajaran, publikasi ilmiah yang melibatkan penyusunan materi ajar atau modul, serta penelitian di bidang pendidikan. Selain itu, terdapat juga kegiatan inovatif seperti pembuatan alat peraga dan penyusunan pedoman soal ujian. Diharapkan bahwa pengembangan PKB ini akan berdampak positif pada peningkatan kompetensi guru PAI, yang pada

---

<sup>45</sup> Septiana Wulandari dan Supriyoko, “Implementasi Pelaksanaan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) Guru Sekolah Dasar,” *Media Manajemen Pendidikan* 5, no. 1 (2022)

<sup>46</sup> Abdul Rahman, Rosidah, dan Rara Nur Fadya, “Deskripsi Kompetensi Pedagogik Guru Matematika Sebagai Dampak Dari Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Dalam Bentuk MGMP Di Kabupaten Takalar,” *Issues in Mathematics Education* 8, no. 1 (Maret 2024):

gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa<sup>47</sup>.

Persamaan dari penelitian terdahulu yang telah dikaji dengan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam meningkatkan kualitas guru, baik dalam aspek kompetensi profesional maupun kompetensi pedagogik. Penelitian Nurkholis et al. (2023) serta Septiana Wulandari dan Supriyoko (2022) menyoroti bagaimana implementasi PKB dalam bentuk pelatihan, workshop, dan publikasi ilmiah berkontribusi pada peningkatan kapasitas guru. Sementara itu, penelitian Siti Rukayah et al. (2023) serta Abdul Rahman et al. (2024) menyoroti pengaruh PKB terhadap kinerja dan kompetensi guru, menunjukkan bahwa guru dengan tingkat keikutsertaan yang lebih tinggi dalam PKB memiliki kompetensi yang lebih baik. Studi dari Dina Sartika et al. (2024) juga memperkuat bahwa PKB berkontribusi dalam peningkatan kapasitas guru Pendidikan Agama Islam (PAI) melalui pelatihan, publikasi, serta inovasi pembelajaran. Dengan demikian, kesamaan utama penelitian ini dengan studi terdahulu adalah sama-sama meneliti PKB sebagai variabel utama dalam pengembangan kompetensi guru, baik di tingkat Madrasah Aliyah, Sekolah Dasar, maupun dalam konteks pendidikan agama.

Namun, penelitian ini memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Jika studi-studi terdahulu lebih menitikberatkan pada implementasi PKB secara umum atau pengaruhnya terhadap peningkatan kompetensi guru dalam berbagai jenjang pendidikan, penelitian ini lebih spesifik mengkaji pengaruh kebijakan program pelatihan PKB terhadap kompetensi profesional dan pedagogik guru dalam konteks KKG di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang secara langsung menghubungkan kebijakan PKB dengan hasil konkret dalam peningkatan dua aspek kompetensi guru di kelompok kerja guru (KKG) dalam lingkungan Kemenag. Oleh karena itu, penelitian ini layak untuk dilanjutkan karena

---

<sup>47</sup> Dina Sartika, Tamyis, dan Endang Ekowati, "Peningkatan Kapasitas Guru Pendidikan Islam Melalui Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan," *Unisan Jurnal: Jurnal Manajemen dan Pendidikan* 3, no. 1 (2024)

akan memberikan kontribusi ilmiah yang lebih spesifik terhadap efektivitas kebijakan PKB, serta memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana kebijakan tersebut dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas guru, khususnya dalam konteks pendidikan Islam di Kabupaten Bandung Barat.

### **G. Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan deskripsi kerangka berpikir yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah:

#### **H<sub>0</sub> (Hipotesis Nol):**

Kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

#### **H<sub>1</sub> (Hipotesis Alternatif):**

Kebijakan Program Pelatihan Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan (PKB) terdapat pengaruh signifikan terhadap kompetensi profesional dan pedagogik guru di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat.

UNIVERSITAS ISLAM SUNAN GUNUNG DIAT  
BANDUNG